

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi nasional memerlukan fondasi yang kuat untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sistem ekonomi yang terkelola dengan baik mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas keuangan, serta memperkuat daya saing global. Infrastruktur merupakan salah satu sektor strategis yang berfungsi sebagai pilar utama pertumbuhan karena mendukung konektivitas, distribusi barang, dan peningkatan produktivitas nasional.

Sektor infrastruktur memiliki karakteristik berbeda dari sektor-sektor lain, bidang ini memerlukan alokasi investasi yang cukup besar, melibatkan proyek jangka panjang, dan menghadapi ketidakpastian tinggi. Risiko yang melekat pada proyek infrastruktur dapat berupa keterlambatan, pembengkakan biaya, perubahan regulasi, hingga fluktuasi kondisi makroekonomi. Kepercayaan investor serta resiliensi operasional jangka panjang bagi entitas infrastruktur sangat bergantung pada pengimplementasian kerangka tata kelola yang rigid guna memitigasi kompleksitas yang ada.

Integritas, akuntabilitas, serta transparansi operasional suatu entitas sangat bergantung pada efektivitas mekanisme Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian oleh (Lokaputra et al., 2022) mengidentifikasi bahwa variabel-variabel tata kelola mencakup kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta keberadaan komite audit dan manajemen risiko merupakan determinan utama yang memengaruhi luasnya pengungkapan manajemen risiko. Selaras dengan temuan tersebut, (Swarte et al., 2020) mempertegas bahwa ukuran dewan komisaris independen dan proporsi kepemilikan publik memberikan kontribusi positif serta signifikan terhadap transparansi informasi risiko tersebut. Meskipun efektivitas komite audit dalam memoderasi hubungan ini terkadang menunjukkan hasil yang tidak signifikan (Lidya Primadona et al., 2024)) menekankan bahwa kehadiran komisaris independen secara konsisten memberikan dampak penguatan yang substansial terhadap pelaporan risiko. Secara fundamental, instrumen-instrumen GCG ini diproyeksikan untuk memitigasi asimetri informasi dan meminimalkan benturan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham, yang pada akhirnya akan mengakselerasi keterbukaan informasi korporasi secara menyeluruh.

Kesenjangan informasi yang krusial antara jajaran manajerial dan pemegang saham merupakan fenomena sentral yang diuraikan dalam teori agensi. Dalam dinamika ini, pihak manajemen kerap menunjukkan tendensi untuk memitigasi keterbukaan risiko atau justru mengakomodasi kepentingan jangka pendek secara oportunistik. Guna menyelaraskan kembali arah pengambilan keputusan dengan ekspektasi para pemegang saham, implementasi mekanisme tata kelola perusahaan yang reliabel menjadi instrumen pengawasan perilaku manajemen yang esensial. Sejalan dengan argumentasi (Triyuwono et al., 2020), tata kelola tersebut pada

hakikatnya beroperasi sebagai sistem manajemen risiko fundamental; sebuah variabel mediasi yang secara substansial mengeskalasi nilai perusahaan.

Kualitas tata kelola suatu entitas bisnis dapat diukur secara fundamental melalui transparansi pengungkapan manajemen risikonya. Signifikansi variabel ini terhadap apresiasi pasar divalidasi oleh temuan (Suci Rahmasari & Wuryan Andayani, 2018), yang menegaskan bahwa *enterprise risk management (ERM) disclosure* merupakan determinan pendorong bagi peningkatan nilai perusahaan. Premis tersebut memperoleh dukungan empiris lebih lanjut dalam studi (Supriyadi & Setyorini, 2020); mereka mengonfirmasi bahwa keterbukaan informasi mengenai risiko berkorelasi positif dengan profitabilitas serta valuasi korporasi, mengingat pengungkapan tersebut merepresentasikan kompetensi manajerial dalam mengeksplorasi peluang secara efektif. Dengan menyediakan data komprehensif terkait profil risiko dan skema mitigasi, perusahaan sejatinya mentransmisikan sinyal kredibel kepada investor mengenai komitmen strategis dalam menjamin keberlangsungan operasional jangka panjang.

Kinerja perusahaan infrastruktur sangat rentan terhadap degradasi apabila berbagai spektrum ancaman yang mencakup risiko keuangan, operasional, proyek, hukum, hingga lingkungan gagal dimitigasi secara komprehensif. Mengingat sifatnya yang multidimensi, urgensi pengelolaan variabel-variabel tersebut menjadi determinan utama dalam menjaga stabilitas dan kapabilitas organisasi. Pengungkapan risiko yang jelas membantu pemangku kepentingan menilai sejauh mana perusahaan mampu mengidentifikasi dan mengendalikan potensi kerugian.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen risiko dan tata kelola memiliki kaitan erat dengan kinerja keuangan (Supriyadi & Setyorini, 2020) menyatakan bahwa pengelolaan risiko yang optimal mampu menjaga stabilitas profitabilitas. Kinerja finansial korporasi ditemukan memiliki korelasi positif yang signifikan dengan implementasi mekanisme tata kelola, khususnya melalui peran dewan komisaris independen serta komite audit (De Lavanda & Meiden, 2022) Walaupun mayoritas literatur terdahulu menitikberatkan observasinya pada ranah industri yang berbeda, fundamental prinsip tersebut tetap relevan untuk diakomodasi dalam sektor infrastruktur. Hal ini mengingat karakteristik sektor tersebut yang secara inheren terpapar pada profil risiko yang masif serta kompleksitas operasional yang tinggi.

Perusahaan infrastruktur yang gagal mengelola risiko berpotensi menghadapi konsekuensi serius, termasuk penurunan nilai saham, kerugian finansial, hingga hilangnya kepercayaan publik. Kasus internasional seperti Enron dan Worldcom membuktikan bahwa laporan keuangan semata tidak cukup untuk mencerminkan kesehatan perusahaan. Transparansi pengelolaan risiko menjadi faktor krusial dalam mencegah terulangnya kegagalan serupa.

Regulasi terkait pengungkapan manajemen risiko di Indonesia untuk perusahaan non-keuangan masih terbatas. Padahal, penerapan prinsip GCG dalam manajemen risiko yang melibatkan peran aktif seluruh elemen internal perusahaan (seperti direksi, komisaris, hingga auditor) sangat krusial dalam memitigasi risiko sejak dini. Kewajiban

bagi emiten untuk mentransparansikan profil risiko dalam laporan tahunan secara eksplisit diamanatkan oleh instrumen regulasi yang berlaku, yakni PSAK 60 (Revisi 2010) serta Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-431/BL/2012. Implementasi pengungkapan informasi tersebut kini bukan lagi sekadar opsional, melainkan sebuah prasyarat kepatuhan yang harus dipenuhi oleh entitas pelapor berdasarkan kerangka hukum tersebut. Standar yang belum seketat sektor perbankan ini menyebabkan kualitas pengungkapan antar perusahaan infrastruktur masih bervariasi.

Ketidakpastian dalam mengevaluasi profil kesehatan korporasi sering kali dipicu oleh adanya diskrepansi pada kualitas transparansi informasi yang tersedia bagi para pemodal. Secara tipikal, entitas berskala besar menunjukkan kecenderungan yang lebih proaktif dalam mendiseminasikan risiko organisasional jika dibandingkan dengan entitas berskala kecil. Temuan empiris dari (Lahfah & Rahayu, 2023) mengukuhkan dinamika ini, di mana luasnya cakupan pengungkapan *enterprise risk management* secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa determinan kunci. Variabel-variabel seperti eksistensi komite manajemen risiko, rasio *leverage*, serta maturitas atau umur perusahaan terbukti memiliki dampak positif, baik saat diuji secara simultan maupun melalui analisis parsial. Lebih lanjut, elemen pengawasan lainnya seperti ukuran dewan komisaris juga menjadi faktor penentu sejauh mana pengungkapan manajemen risiko tersebut dilakukan secara memadai dan konsisten (Annisa Nurbaiti, 2023).

Signifikansi investigasi terhadap interelasi antara mekanisme tata kelola korporasi dan transparansi manajemen risiko dalam memengaruhi luaran finansial pada sektor infrastruktur tetap menjadi diskursus krusial yang memerlukan pendalaman literatur lebih lanjut. Penelitian di bidang ini memberikan kontribusi akademik dengan memperkuat literatur mengenai praktik GCG di perusahaan non-keuangan. Hasil penelitian juga dapat digunakan oleh regulator sebagai dasar untuk memperbaiki standar pengungkapan risiko di Indonesia.

Investigasi ini menitikberatkan pada analisis komprehensif mengenai bagaimana berbagai elemen tata kelola perusahaan mengintervensi pengungkapan manajemen risiko serta implikasinya terhadap kinerja keuangan. Objek pengamatan difokuskan secara spesifik pada entitas dalam sektor perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI, guna memetakan korelasi antarvariabel tersebut dalam konteks pasar modal Indonesia. Temuan penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat transparansi informasi, serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui perusahaan yang sehat dan berdaya saing.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penyelidikan ilmiah ini dikonstruksikan untuk menjawab diskursus permasalahan sebagai berikut:

- a. Sejauh mana tata kelola perusahaan memproyeksikan pengaruh deterministik terhadap intensitas pengungkapan manajemen risiko pada entitas yang beroperasi di dalam Sektor Infrastruktur?

- b. Apakah terdapat korelasi substansial di mana pengungkapan manajemen risiko berperan sebagai prediktor bagi fluktuasi kinerja keuangan dalam cakupan Sektor Infrastruktur?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Penelitian ini secara sistematis diarahkan untuk mencapai dua objektif utama:

- a. Menganalisis signifikansi mekanisme tata kelola perusahaan dalam memoderasi intensitas pengungkapan manajemen risiko pada sektor infrastruktur.
- b. Menguji pengaruh pengungkapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan Sektor Infrastruktur.

1.4. Kontribusi/ Manfaat Tugas Akhir

Adapun kontribusi tugas akhir ini jabarkan melalui point point di bawah ini:

- a. Penelitian ini memperluas cakrawala teoretis dalam domain akuntansi, keuangan, serta tata kelola korporasi. Secara spesifik, urgensi studi ini terletak pada artikulasi hubungan antara corporate governance dan pengungkapan manajemen risiko dalam memengaruhi kinerja keuangan Sektor Infrastruktur, yang pada gilirannya memberikan fondasi empiris baru bagi literatur terkait.
- b. Menyediakan informasi yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengungkapan risiko dan governance sebagai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan, sehingga dapat menunjang pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat bagi investor dan stakeholder.
- c. Kajian ini diharapkan dapat mengatalisasi studi lanjutan di bidang terkait, dengan menyediakan basis referensi bagi para peneliti untuk menguji validitas temuan melalui pendekatan alternatif ataupun lokus penelitian yang lebih bervariasi.